

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan strategis dalam menopang perekonomian Indonesia. Indonesia termasuk salah satu negara berkembang dalam hal kemajuan di bidang ekonomi, teknologi, sosial, sumber daya manusia dan sebagainya. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II tahun 2022 tumbuh 5,44 persen, terdapat tiga sektor yang berkontribusi tinggi salah satunya ialah pertanian. Hal ini terlihat dari besaran distribusi dan andil pertanian yang mencapai 12,98 persen atau tumbuh meyakinkan sebesar 1,37 persen (BPS, 2022).

Pertanian merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam kehidupan, selain untuk memenuhi kebutuhan pangan, pertanian juga memberikan pengaruh terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Ketika pendapatan masyarakat meningkat, maka tingkat konsumsi masyarakat juga akan meningkat. Peningkatan daya konsumsi dan pendapatan masyarakat memberikan pengaruh terhadap peningkatan pendapatan nasional. Sehingga, pembangunan sektor pertanian yang berkelanjutan sangat perlu dilakukan untuk membantu pembangunan nasional Indonesia (Nurmala et.al, 2012).

Untuk mencapai pembangunan pertanian, kelimpahan sumber daya alam tidaklah cukup. Terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan seperti inovasi teknologi yang tepat guna dan sumber daya manusia yang terdidik. Petani sebagai sumberdaya manusia memiliki peranan penting untuk mendorong produksi dan produktivitas hasil pertanian. Karena keberhasilan dalam usaha tani ditentukan oleh sumberdaya manusia yang kompeten dan berkualitas. Selain faktor sumber daya manusia, peningkatan kinerja sektor pertanian dipengaruhi oleh faktor lainnya seperti sarana produksi. Pupuk merupakan salah satu sarana produksi (saprodi) yang sangat menentukan produksi dan produktivitas pertanian. Oleh karena itu, ketersediaan pupuk dipasar baik dari segi kuantitas, kualitas dan harga yang terjangkau menjadi salah satu syarat yang harus dapat dijamin oleh pemerintah (Sularno, 2016).

Salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pembangunan di sektor pertanian dengan Program Kartu Tani. Hadirnya program kartu tani dilatarbelakangi oleh keinginan dalam meningkatkan produktivitas petani dalam usahatani dan upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan subsidi pupuk. Hal tersebut menjadi suatu kompleksitas masalah yang perlu diatasi secara strategis dan solutif karena pupuk merupakan salah satu faktor produksi yang penting dalam peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian sehingga pemerintah perlu melakukan kebijakan dalam penyediaan pupuk bagi petani melalui subsidi harga pupuk yang terintegrasi dengan program kartu tani.

Kartu Tani menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 Tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi adalah kartu yang dikeluarkan oleh perbankan kepada petani untuk digunakan dalam transaksi penebusan pupuk bersubsidi melalui mesin *electronic data capture* (EDC) di kios pengecer resmi. Program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani bertujuan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani atau kelompok tani, terwujudnya distribusi pupuk bersubsidi yang sesuai dengan asas 6 (enam) tepat (tepat jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu dan harga) dan meningkatkan pemberian layanan perbankan bagi petani untuk memperoleh akses pembiayaan dari perbankan.

Pemanfaatan teknologi perbankan yang diterapkan dalam kartu tani diharapkan dapat mengoptimalkan penyaluran pupuk subsidi (Urea, SP 36, ZA, NPK, Organik), hal ini akan memberikan kontribusi bagi kemajuan serta peningkatan taraf hidup masyarakat khususnya kelompok tani (Ismi, 2017). Program kartu tani ini selain melibatkan petani, juga melibatkan kios pengecer, pemerintah, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Bagi petani yang ingin mendapat kartu tani, cukup dengan mendatangi bank BRI terdekat dan menyerahkan KTP. Jika data tersebut cocok dengan server, maka petani dapat langsung membuka rekening BRI dan mendapatkan kartu tani. Kartu tersebut kemudian dapat digunakan untuk membeli pupuk di kios pengecer resmi yang sudah ditunjuk pemerintah.

Peluncuran kartu tani ditunjukkan untuk meningkatkan pelayanan jasa perbankan bagi pelaku kelompok tani. Kartu tani adalah usaha pemerintah untuk mewujudkan pendistribusian, pengendalian dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada petani yang berhak untuk menerimanya sesuai dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Provinsi Sumatera Barat mulai menyalurkan kartu tani pada awal 2020 melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kota Padang yang menjadi salah satu penyaluran program kartu tani melalui transaksi non tunai. Dinas Pertanian Kota Padang pada tanggal 8 Januari 2020, telah menyalurkan kartu tani sebanyak 5.902 kartu tani bagi petani di 10 kecamatan di Kota Padang, yakni Kecamatan Padang Utara 57 kartu, Kecamatan Padang Timur 68 kartu, Kecamatan Lubuk Begalung 171 kartu, Kecamatan Koto Tengah 175 kartu, Kecamatan Nanggalo 242 kartu, Kecamatan Lubuk Kilangan 524 kartu, Kecamatan Padang Selatan 540 kartu, Kecamatan Bungus Teluk Kabung Sebanyak 678 kartu, Kecamatan Pauh 1.126 kartu, dan Kecamatan Kuranji 1.506 kartu.

Berdasarkan penyaluran kartu tani tersebut, Kecamatan Kuranji adalah kecamatan yang memperoleh jumlah kartu tani terbanyak yaitu sebanyak 1.506 kartu. Sebelumnya Kecamatan Kuranji sudah memiliki kartu yaitu sebuah kertas berwarna kuning untuk menebus pupuk. Setelah adanya kartu tani yang dibagikan kepada kelompok tani, Kelompok Patamuan merupakan salah satu kelompok yang telah menerima kartu tani terbanyak di Kecamatan Kuranji dengan jumlah anggota kelompok sebanyak 71 orang. Tempat pengambilan pupuk bersubsidi atau kios yang terdapat di Kecamatan Kuranji terdapat 2 kios, yaitu kios Anugrah dan Sejahtera dimana sistem pengambilannya yaitu setiap anggota kelompok melakukan pengambilan di kios yang telah ditentukan.

B. Rumusan Masalah

Pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan yang diprogramkan oleh pemerintah yang dalam pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani di sektor pertanian. Sedangkan Pupuk non subsidi dalam pengadaan dan penyalurannya tidak mendapat subsidi dari pemerintah atau di luar program pemerintah (Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor:

70/MPP/Kep/2/2003). Menurut Rachman (2009), permasalahan utama kinerja subsidi pupuk terdapat pada sisi perencanaan, distribusi dan pengawasan, termasuk keterbatasan anggaran belanja pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan meliputi aspek teknis, manajemen dan regulasi supaya efektivitas pelaksanaan subsidi pupuk dapat tercapai. Kurangnya pengawasan pemerintah terhadap proses pendistribusian pupuk membuka kemungkinan adanya penimbunan pupuk oleh para pengecer yang akan menyebabkan terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi. Ketersediaan pupuk di sektor pertanian sudah dianggarkan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan petani, namun yang terjadi kebutuhan pupuk setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, sementara produksinya terbatas sehingga hal ini menyebabkan kelangkaan pupuk.

Kelangkaan pupuk bersubsidi merupakan suatu kondisi dimana sulitnya petani sebagai penerima manfaat mendapatkan pupuk bersubsidi baik dari segi jumlah maupun waktunya. Meskipun pupuk bersubsidi harganya lebih terjangkau sehingga dengan adanya pupuk bersubsidi ini petani lebih terbantu dari aspek pembiayaan, tetapi jika ketersediaan pupuk bersubsidi ini terbatas maka akan menjadi masalah bagi petani (Rohmayani, 2016).

Bersamaan dengan hal tersebut terdapat upaya dalam penyaluran pupuk bersubsidi, yaitu dengan cara melakukan pembaharuan kebijakan. Pembaharuan kebijakan tersebut tidak lepas dari perkembangan teknologi yang dianggap efektif dan efisien dalam mengelolah penyaluran pupuk bersubsidi. Program kartu tani ini merupakan suatu inovasi sebagai bentuk partisipasi dan perhatian pemerintah dalam pendistribusian, pengawasan dan pengendalian pupuk bersubsidi kepada petani yang berhak menerima dan pemberian layanan perbankan kepada petani sesuai dengan program yang diusulkan oleh pemerintah kemudian ditetapkan dan ditegaskan dalam penggunaan Kartu Tani Pasal 17 ayat 2 peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) No.10 Tahun 2020. Program kartu tani diterapkan di seluruh Indonesia pada tahun 2020 sebagai program nasional hingga pada saat ini. Kartu tani merupakan kartu debit BRI yang digunakan secara khusus untuk membaca alokasi pupuk bersubsidi dan transaksi pembayaran pupuk bersubsidi di mesin *Electronic Data Capture* (EDC) BRI (Bank Rakyat Indonesia) yang

ditempatkan di pengecer serta dapat berfungsi untuk melakukan seluruh transaksi perbankan pada umumnya.

Provinsi Sumatera Barat mulai menyalurkan kartu tani pada awal 2020 melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kota Padang menyalurkan kartu tani sebanyak 5.902 kartu tani bagi petani di 10 kecamatan di Kota Padang, yakni Kecamatan Padang Utara 57 kartu, Kecamatan Padang Timur 68 kartu, Kecamatan Lubuk Begalung 171 kartu, Kecamatan Koto Tangah 175 kartu, Kecamatan Nanggalo 242 kartu, Kecamatan Lubuk Kilangan 524 kartu, Kecamatan Padang Selatan 540 kartu, Kecamatan Bungus Teluk Kabung Sebanyak 678 kartu, Kecamatan Pauh 1.126 kartu, dan Kecamatan Kuranji 1.506 kartu.

Berdasarkan penyaluran kartu tani tersebut, Kecamatan Kuranji adalah kecamatan yang memperoleh jumlah kartu tani terbanyak yaitu sebanyak 1.506 kartu, namun berdasarkan pra survey penelitian yang peneliti lakukan terdapat beberapa masalah yang dikemukakan oleh salah satu penyuluh di BPP Nanggalo terhadap kelompok tani Patamuan di Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji seperti penggunaan kartu tani masih dilakukan secara manual yaitu menggunakan uang tunai untuk membeli pupuk bersubsidi, dikarenakan petani merasa dirumitkan jika harus berurusan dengan pihak Bank untuk mengisi saldo kartu taninya terlebih dahulu sebelum menebus pupuk di kios pengecer resmi, dan kepastian mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai dengan musim tanam, serta sulitnya koordinasi dalam menerapkan kartu tani antara petani, pemilik kios, dan petugas penyuluh pertanian. Hal ini menyebabkan penggunaan kartu tani di kecamatan Kuranji sebagai kecamatan terbanyak yang menerima kartu tani kurang optimal.

Keberhasilan suatu program sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh persepsi seseorang yang menjadi objek terhadap program tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Stephen (2006) bahwa persepsi merupakan proses yang digunakan individu mengelola dan menafsirkan kesan indera mereka dalam rangka memberikan makna kepada lingkungan mereka. Persepsi individu ditunjukkan oleh pandangan yang dimiliki seseorang mengenai inovasi berdasarkan kebutuhan dan pengalaman mereka, yang akan mempengaruhi sikap

seseorang terhadap inovasi (Meijer *et al.* 2015). Meski demikian apa yang dipersepsikan seseorang dapat berbeda dari kenyataan yang objektif. Persepsi petani terhadap kartu tani adalah respon langsung dari petani tentang bagaimana inovasi tersebut dan apakah program kartu tani tersebut dapat diterima atau tidak.

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti ingin melihat bagaimana persepsi petani terhadap kartu tani. Persepsi petani terhadap kartu tani sangat penting untuk diteliti karena keberhasilan adanya program kartu tani tidak terlepas dari pandangan petani sebagai sasaran dari adanya program tersebut. Persepsi petani sangat penting terhadap karakteristik inovasi karena menjadi dasar untuk membuat keputusan apakah menerima atau menolak suatu inovasi. Van den Ban dan Hawkins (2003) Dalam Tedjaningsih (2017) menyatakan bahwa tingkat adopsi dari suatu inovasi akan bergantung kepada persepsi seseorang tentang karakteristik inovasi. Karakteristik inovasi tersebut ialah keunggulan relatif, tingkat kesesuaian, tingkat kerumitan, kemudahan untuk dicoba dan kemudahan untuk diamati. Persepsi merupakan proses aktif penggunaan pikiran sehingga menimbulkan tanggapan terhadap suatu rangsangan. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Persepsi Petani terhadap Kartu Tani di Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang (Studi Kasus Kelompok Tani Patamuan Kelurahan Kuranji)”**. Oleh sebab itu, berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas timbulah pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik petani pemilik kartu tani di kelompok Patamuan Kecamatan Kuranji?
2. Bagaimana persepsi petani pemilik lartu tani terhadap kartu tani di kelompok Patamuan Kecamatan Kuranji?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan karakteristik petani pemilik kartu tani di kelompok tani Patamuan Kecamatan Kuranji
2. Mendeskripsikan persepsi petani pemilik kartu tani terhadap kartu tani di kelompok tani Patamuan Kecamatan Kuranji

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi mengenai Program Kartu Tani dan juga pendistribusian pupuk bersubsidi bagi petani.
2. Penelitian ini dapat memberikan informasi bagi pemerintah daerah yang membutuhkan gambaran pelaksanaan kartu tani di lapangan sehingga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan perencanaan pembangunan dan kebijakan pendistribusian pada bidang pertanian.

